

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Artinya, Negara Indonesia lebih menekankan bahwa hukum lah yang menjadi panglima. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang ada dalam Negara Indonesia ini, ada hukum yang mengaturnya. Baik yang bersifat privat maupun yang bersifat publik selalu terdapat aturan yang mengatur mengenai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh warga negara.

Setiap kejahatan tentunya berdampak negatif, apalagi korupsi, lebih makro lagi dampak korupsi itu, semakin refolutif. Perubahan pola atau gaya berkorupsi dapat mengakibatkan rapuhnya bangunan negara hukum, apa lagi jika pelakunya berasal dari para penguasa yang eksklusif, dan sifat diskresi pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan dapat mengakibatkan meningkatnya perbuatan korupsi. sehingga korupsi akan selalu terhubung dengan sifat monopoli, dikresi dan akuntabilitas. Begitu juga sebaliknya, bila kekuasaan terpusat atau terbagi, seperti otonomi daerah, sehingga korupsi akan selalu mengikuti sesuai dengan otonomi tersebut. Permasalahan ini di karenakan kekuasaan berpindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak pusat kekuasaan yang otonom, jadi virus korupsi pun akan selalu mengikuti yang mana berpindah dari satu pusat

kekuasaan menalir ke banyak pusat kekuasaan maka dari pada itu, pemberantasan korupsi bukanlah sekedar penerapan pasal, legal reasoning sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi harus pada titik oligarki politik – bisnis¹.

Dampak korupsi yang demikian besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa kecuali. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab rakyat untuk ikut bersama-sama memerangi korupsi. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang dinamakan dengan White Collar Crime yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat” karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian.² paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Arti dari pembuktian itu adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadaterdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang

¹ Wafda Vivid Izziyana, *Korupsi Dalam Dimensi Kekuasaan Law Pro Justitia*, I (2) ISSN 2477-8176, diakses tanggal 29 Desember 2019.

² Selamat Agista Erikha Bhakti, dan Djauhari, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 2 Juni 2017, website : Jurnal diakses tanggal 29 Desember 2019.

didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.³

Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana korupsi untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana korupsi pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidananya seseorang. Alat bukti petunjuk pada dasarnya Sesuai ketentuan pasal 188 KUHP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.⁴

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273

⁴Nurul Wahida, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian*, https://www.academia.edu/28783722/Alat_Bukti_dan_Kekuatan_Pembuktian diakses pada tanggal 02 Januari 2020.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan⁵:

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.
3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Dalam pembuktian hukum pidana terdapat prinsip-prinsip pembuktian antara lain: Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal - hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan” atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan, yaitu.

- a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Dan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia.

⁵ Ibid.

- b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.⁶

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: “Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.⁷ Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.⁸

Berkaitan dengan putusan ini terdapat beberapa hal dikaji lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Kasus posisi : terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang dalam hal ini adanya penyalahgunaan wewenang yang melibatkan kontraktor dan konsultan proyek kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri. Adanya ketidaksesuaian antara gambar yang disepakati dengan model pembangunan yang diperjanjikan. Akibat perbuatan tersebut, negara mendapatkan kerugian sebesar Rp 578.083.213. Berdasarkan penemuan di lapangan oleh Penuntut Umum. Yang dilakukan oleh Ir. Hadi Putranto sebagai

⁶Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Swadaya Grup, Jakarta, hlm. 41, 2011

⁷Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2, 1995

⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.273

Terdakwa I dan Deni Herdian sebagai Terdakwa II. Para Terdakwa melakukannya dengan cara memperkaya diri yang mengakibatkan kerugian negara.

2. Terdakwa I dan II didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi, dengan pasal Kesatu Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. Atau Kedua : Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.⁹

⁹ Direktori Mahkamah Agung Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, hlm. 120-121, diakses tanggal 24 Januari 2020

3. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara dalam putusan ini, dengan mendengarkan keterangan saksi sebanyak 16 orang saksi, keterangan ahli sebanyak 2 ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebanyak 61 barang (surat, buku tabungan, cek, stempel, slip pembayaran, dan uang tunai).¹⁰
4. Tuntutan Jaksa dalam hal ini jaksa penuntut umum dengan tuntutan yang pada pokoknya berisi mengenai menyatakan mereka terdakwa I. Ir. HADI PUTRANTO dan terdakwa II DENI HERDIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.
5. Dalam Pertimbangan Hakim, dalam putusan ini pertimbangan hakim berupa pertimbangan bukti petunjuk yang berasal dari penilaian secara obyektif rangkaian perbuatan-perbuatan para Terdakwa yang merupakan perbuatan yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas). Rangkaian perbuatan sesuai fakta hukum

¹⁰ Ibid., hlm. 164 - 170

tersebut diatas dapat menunjukan keadaan sikap bathin para Terdakwa yang menunjukan para Terdakwa mengetahui dan menghendaki (*wetten en willen*) akibat dari perbuatannya terwujud, dilaksanakan oleh diri sendiri dan atau orang lain, mempunyai sifat melawan hukum, dapat dijadikan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo ayat 2 KUHAP¹¹

6. Dalam Putusan Hakim, pada pokoknya Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dakwaan alternatif kedua subsidair, Terdakwa I dan II dipidana selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan denda masing – masing Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), menetapkan barang bukti sebanyak 61 barang bukti, dan membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima Ribu rupiah).¹²

Berdasarkan poin diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai isi putusan hakim tersebut karena alat bukti petunjuk tersebut dapat digunakan dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi.

Dalam putusan hakim tersebut, hakim menjatuhkan putusan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Ibid., hlm 170 - 173

¹² Ibid., hlm. 173 - 180

Dikarenakan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*. Suatu asas hukum yang memiliki arti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dalam hal ini aturan khusus yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena dalam aturan ini memiliki ketentuan yang lebih khusus mengatur tindak pidana korupsi. Sementara aturan yang umum yang dikesampingkan dalam perkara ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dikarenakan dalam ketentuan ini hanya mengatur secara umum mengenai tindak pidana sehingga adanya perbedaan ketentuan yang terdapat dalam aturan tersebut.

Asas *lex specialis derogat lex generalis* ini memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapannya, yaitu.

1. Ketentuan – ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur dalam aturan khusus tersebut.
2. Ketentuan – ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang – Undang dengan Undang – Undang).
3. Ketentuan – ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Dikarenakan kerugian negara kurang dari 1 Milyar, maka kasus ini tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat terlibat apabila kerugian negara sebesar 1 Milyar, ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kasus ini diperiksa dan dipersidangkan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis paparkan mengenai penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi, penulis akan membahas tentang ke abstrakan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim. Maka dari itu, dari pembahasan di atas penulis membahas judul **“Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 188 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan alat bukti petunjuk untuk menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby ?
2. Bagaimanakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby menurut aspek keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini Diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan kualifikasi bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi

2. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi menurut para ahli

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat Teoritis hasil penulisan ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan nasional nasional pada umumnya, dan memberikan tambahan referensi 1kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan sebagai tambahan bagi perpustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat di sumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat menyadari dan mengetahui arti pentingnya manusia sebagai generasi bangsa

E. Manfaat Penelitian

Berharap hasil penelitian ini dapat melahirkan manfaat-manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian hukum ini selain sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang Ilmu Hukum, juga mampu mengetahui dan memahami dasar pertimbangan kualifikasi dan penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

tindak pidana korupsi. Juga diharapkan mampu memperkaya wawasan dan mempertajam kemampuan analisis atas berbagai persoalan hukum yang ada di masyarakat.

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang kongkrit dan pengetahuan ilmiah mengenai duduk persoalan hukum pertimbangan kualifikasi dan penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi menurut para ahli.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum (Pemerintah) untuk meninjau kembali suatu pertimbangan kualifikasi dan penggunaan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu melakukan kajian terhadap produk – produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan melihat realita yang ada dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan¹³. Objek yang diteliti

¹³ Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali, Jakarta, Hal. 29

adalah bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai data sekunder.¹⁴ Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data hukum sekunder.¹⁵ Dengan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat. Adapun aspek yuridis dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. Sedangkan aspek normatif dalam penelitian ini adalah penerapan alat bukti petunjuk sebagai dasar hukum menjatuhkan putusan.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang mengikat antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
- e) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-

¹⁴ Hotma Pardoumuan dan Herybertus, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Hal. 79

¹⁵ Dyah Ochtorina. A'anEfendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta 2014. Hlm. 20

buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.¹⁶

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus hukum
- c) Situs internet yang berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data mengenai sesuatu yang memberi bukti atau bahan-bahan untuk membandingkan suatu keterangan atau informasi, penjelasan atau dokumentasi dalam naskah asli atau informasi tertulis. Teknik ini berguna untuk membandingkan suatu data yang peneliti teliti, khususnya mengenai tindak pidana korupsi. Adapun yang akan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 141

menjadi dokumen penelitian adalah Putusan Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2018./PN.Sby

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis¹⁷. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi.

4. Metode Analisis

a. Content Analysis

Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis sesuatu hal secara sistematis, objektif, dan secara rinci terhadap pesan yang disampaikan. Metode analisis ini merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan shahih datanya dengan memerhatikan konteksnya. Isi yang dianalisis adalah isi Putusan Hakim Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby.

b. Analisis Preskriptif

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35

Analisis preskriptif ini merupakan suatu metode analisis yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep - konsep hukum, dan norma - norma hukum.¹⁸ Menganalisis suatu permasalahan hukum dengan menyandarkan pada isi yang terkandung dalam suatu hukum yang dibuat. Analisis preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.¹⁹

G. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang paparan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti

¹⁸ Ibid. Hlm. 22

¹⁹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 9

akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori dan konseptual mengenai: teori tentang penerapan alat bukti petunjuk

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud adalah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi

4. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saransaran yang relevan dengan penelitian tersebut.